

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM,  
PAD, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH  
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019 )**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1)*



Oleh :

**Alan Sepriadi**

**2016/16043071**

*Dosen Pembimbing :*

**Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

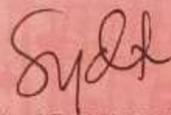
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM,  
PAD, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH  
TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019 )

Nama : ALAN SEPRIADI  
NIM/TM : 16043071/2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 juni 2021

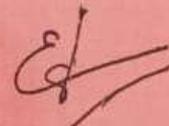
Disetujui Oleh:

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA  
NIP.19800103 200212 2 001

Pembimbing



Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak  
NIP. 19781204 200801 2 011

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

Judul : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
DANA ALOKASI UMUM, PAD, SISA LEBIH  
PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS  
WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu  
Tahun 2015 – 2019 )

Nama : ALAN SEPRIADI

NIM/TM : 16043071/2016

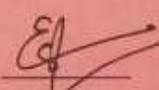
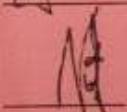
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 14 Juni 2021

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak	1. 
2	Anggota	Herlina Helmy, SE., AK., M.S.AK., CA	2. 
3	Anggota	Vita Fitria Sari, SE., M.Si.	3. 

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alan sepriadi  
TM/NIM : 2016 / 16043071  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Lubuk sanai III, Kecamatan XIV Koto  
No. HP/Telp : 082373458962  
Judul Skripsi : Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi umum. PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah ( Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019 )

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Oktober 2021

Saya yang menyatakan

  
Alan sepriadi

NIM. 16043071

## **ASTRAK**

**Sepriadi, A. (16043071/2016): Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana  
Alokasi Umum, Pad, Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap  
Belanja Modal Pemerintah (Studi Empiris  
Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun  
2015 - 2019 )**

**Pembimbing : Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Bengkulu Tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik metode jenuh dengan jumlah sampel 9 kabupaten dan 1 kota dengan jangka waktu 5 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

**Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah Daerah". Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dapat mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si.Ak selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak selaku dosen penguji 1 untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini. Ibu Vita Fitria Sari, S.E, M.Si selaku dosen penguji 2 untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph. D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Abang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman Ary Syofian, Dewi purnama sar, Anja suryadi, wahyu, inul dan Afan yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk Ayah dan Mak yang sangat penulis sayangi, atas doadao luar biasa yang tidak hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu percaya pada setiap langkah yang penulis pilih dan memberikan keyakinan bahwa penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Ayah dan Mak dapat berbuah manis suatu hari nanti.

8. Ary Syofian terimakasih sudah menjadi mentor seperjuangan dalam proses penyusunan skripsi penulis.

9. Teman seperjuangan Ary, sari, Anja, wahyu dan inul selaku mada Terbaik yang selalu ada disetiap penulis butuh. Teman-teman akuntansi kelas C, penulis beruntung sekali bisa berada diantara orang-orang luar biasa seperti kalian.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan Saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

**Padang, Oktober 2021**

**Alan Sepriadi**  
**NIM. 16043071**

## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakan.....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian .....	9
D.Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Agency Theory .....	11
B. Belanja Modal .....	12
C. Pertumbuhan Ekonomi .....	14
D. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	16
E. Dana Alokasi Umum (DAU).....	17
F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	19
G. Luas Wilayah.....	20
H. Penelitian Terdahulu.....	21
I. KerangkaKonseptual .....	25
J. Hubungan Antar Variabel .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	32
A. Desain Penelitian .....	32
B. Populasi dan Sampel .....	32
C. MetodePengumpulan Data .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	33
F. Teknik Analisis data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. HASIL PENELITIAN.....	40
B. Subjek Penelitian.....	41

C. Pembahasan .....	46
BAB V PENUTUP.....	54
T. KESIMPULAN .....	54
U. KETERBATASAN .....	54
V. SARAN .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN.....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kota/Kabupaten Provinsi Bengkulu .....	32
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu.....	40
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.3 Hasil Chow Test.....	42
Tabel 4.4 Hasil Hausman Test .....	43
Tabel 4.5 Hasil Regresi Panel 1 .....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas .....	45
Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	46

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas..... 37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan dalam permasalahan otonomi daerah sudah menjadi kewajiban, wewenang, serta hak daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonomnya. Kebijakan tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuan dari adanya pengaturan tentang otonomi daerah tidak lain adalah memberikan kesejahteraan dan meningkatkan mutu pelayanan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan pada regulasi UU No. 32 tahun 2004 ditambah dengan UU No. 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah terdapat tantangan konsekwensi logis perubahan tata kelola keuangan daerah. Perubahan ini terjadi seiring diperlukannya penyesuaian anggaran pada APBD. Perubahan tersebut didasarkan pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (17) tentang perencanaan anggaran tahunan daerah untuk di bahas dan disetujui DPRD. Output dari penetapan DPRD adalah keputusan dalam bentuk peraturan daerah. Penyusunan program dan anggaran ini diharapkan mampu menyelaraskan tujuan daerah dalam 1 tahun.

APBD sebagai pedoman pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah memiliki komponen komponen penting yaitu pembiayaan belanja daerah. Pembiayan belanja daerah terbagi atas 2 bentuk yaitu belanja langsung dan tidak. Perbedaan antara belanja langsung dan tidak langsung terletak pada penganggaran pelaksanaan program. Belanja langsung dianggarkan sedangkan belanja tidak langsung tidak berkaitan secara langsung terutama dengan biaya modal ( Miardi Nurzen, 2016 ).

Menurut Halim (2004:101), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi” Belanja modal yang dimaksudkan dalam perencanaan anggaran merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk dapat menambah aset tetap daerah. Aset tetap ini dapat dimanfaatkan lebih dari 1 tahun periode sehingga mampu untuk menunjang ketersediaan sarana dan prasarana publik. Pengaruh yang diharapkan timbul dari realisasi anggaran belanja modal seiring perkembangan sarana dan prasarana publik adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985) Sadono Sukirno (1991) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Tujuan daerah yang mesti menjadi fokus utama pemerintahan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola kekayaan alam dan manusia yang ada dan bekerja sama membuka lapangan kerja baru. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Wibisono & Wildaniati, 2016). Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah meningkat akan sejalan meningkatnya belanja modal,

hal ini akan memberikan efek positif untuk meningkatkan ke berbagai variabel dalam penelitian ini.

DAU menjadi pendapatan yang digunakan untuk pemerataan keuangan daerah yang bersumber dari APBN. Tujuannya pemerataan ini adalah untuk memberikan suntikan dana pada daerah guna implementasi desentralisasi. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kebutuhan daerah dan tingkat potensial daerah akan menentukan besaran penerimaan DAU daerah oleh pusat. Jika penerimaan daerah kurang dari kebutuhan daerah maka akan menggunakan DAU untuk menutupi kekurangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wimpi Priambudi (2017) menyatakan bahwasanya DAU memiliki korelasi positif dan bagi anggaran belanja modal. DAU disimpulkan memiliki peranan besar bagi alokasi anggaran belanja modal. Peningkatan pendanaan DAU dari pemerintah pusat dapat menyebabkan pengalokasi belanja modal ikut meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( Annisa Wahyu Hikmah, 2019).PAD menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam belanja modal. Kenaikan PAD bisa meningkatkan angka

penambahan anggaran belanja modal daerah yang mana di harapkan sepadan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan pendapat Aliantor Harahap ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (2018) di laman situs online [www.kupasbengkulu.com](http://www.kupasbengkulu.com), mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya PAD dipicu rendahnya pula faktor manusianya (SDM). Kurangnya kualitas SDM dibagian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menyebabkan pembangunan daerah masih minim hal ini karena kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu (1) periode pelaporan. Selain Pendapatan Asli Daerah, daerah juga bisa memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk mendanai berbagai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan (Widya, 2018). SILPA menjadi indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Jumlah SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana terhadap belanja modal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.

Rochmatullah dkk (2016:156) menyatakan bahwa kawasan dengan wilayah yang relatif luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan pelayanan publik yang tepat. Daerah dengan daerah pedesaan yang luas perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mengembangkan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. Dalam penelitian Putra (2017:17) memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Peneliti Erdi Adyatma (2015) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Peneliti Rita Devi Setiyani (2015) dengan judul penelitian pengaruh dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan luas wilayah berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan SILPA berpengaruh secara positif terhadap belanja modal. berbeda dengan peneliti sebelumnya, Miardi Nurzen (2016) dengan judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh secara positif terhadap belanja modal.

UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas public (Halim & Abdullah, 2006).

Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah adalah faktor kunci keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan peran utamanya yaitu memberi pelayanan yang maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat, oleh karena itu UU No 23 tahun 2014, memberikan kepada daerah kewenangan yang seluas

luasnya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan fasilitas yang baik. Pemdagri No 33 Tahun 2019, Pemerintah daerah harus memprioritaskan APBD untuk belanja modal agar pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi.

Kecendrungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah overhead cost pemerintah daerah yang tinggi ini telah menyerap sebagian sumber daya yang sangat terbatas untuk membiayai belanja operasional, akibatnya tinggal sedikit sumber daya yang tersisa untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan publik hal ini dapat dilihat pada belanja modal yang kecil dibandingkan dengan belanja pegawai.

Fenomena yang terjadi di Provinsi Bengkulu realitanya belanja daerah lebih besar di alokasikan untuk menutupi beban rutin yang tidak dominan dalam pembangunan daerah dikutip dari data BPS Provinsi Bengkulu bahwa rasio belanja pegawai lebih mendominasi dari belanja modal terhadap total anggaran belanja modal. Peneliti mencoba menggali lebih dalam tentang belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Tahun penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2019. Peneliti menemukan bahwa tidak banyak penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik ini di Provinsi Bengkulu. Sehingga peneliti meyakini bahwa penelitian ini akan baik untuk dilakukan dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi pemerintah daerah setempat nantinya.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.Studi Empiris Pada Kabupaten/ Kota Bengkulu Tahun 2015 – 2019.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi belanja modal ?
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi belanja modal ?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi belanja modal?
4. Bagaimana sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) mempengaruhi belanja modal ?
5. Bagaimana luas wilayah mempengaruhi belanja modal ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk pengaruh dari pertumbuhan ekonomi pada belanja modal.
2. Mengetahui bentuk pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada belanja modal.
3. Mengetahui bentuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada belanja modal.
4. Mengetahui bentuk pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada belanja modal.
5. Mengetahui bentuk Pengaruh Luas Wilayah pada Belanja modal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadi ajang menggali ilmu pengetahuan dan peningkatan wawasan bagi peneliti. Peneliti dapat mengetahui dan mempelajari lebih dalam mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh tersebut terhadap belanja modal pemerintah daerah.

##### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara pengetahuan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan daerah setempat untuk masa yang akan datang. Informasi mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan pemerintahan daerah.

##### **3. Bagi PenelitiSelanjutnya**

Penelitian ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi peneliti lainnya dalam meningkatkan kualitas riset mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, PAD, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah di masa selanjutnya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Agency Theory

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu teori *agency*. Pada dasarnya teori agensi menjelaskan terdapat hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara dua belah pihak yaitu rakyat (sebagai *principal*) yang memberikan tanggungjawabnya kepada pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa atas kepentingan rakyat (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan pihak *agent* dan *principal* terdapat perbedaan kepentingan, dimana *agent* tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan *principal*. (Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual dimana akan mendorong *agent* untuk bertindak bagi *principal* saat kepentingan *agent* bisa saja bertentangan dengan kepentingan *principal*. Pihak rakyat (*principal*) mendelegasikan pertanggungjawabannya atas pengambilan keputusan kepada *agent* (pemerintah) yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab *agent* dan *principal* diatur berdasarkan kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Pihak *agent* bertanggungjawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi *principal*, akan tetapi *agent* juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri, sehingga dalam kenyataannya wewenang yang diberikan *principal* kepada *agent* sering terjadi masalah karena tujuan *principal* berbenturan dengan tujuan pribadi *agent*. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya menyebabkan terjadinya asimetri informasi (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

## **B. Belanja Modal**

### **1. Pengertian Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.06/2007 mengenai Bagan Akun Standar menjelaskan alokasi anggaran yang dimanfaatkan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Halim (2004:101), “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. (Mardiasmo, 2002), “belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja modal digunakan untuk pembentukan modal”. dari penelitian diatas, dapat disimpulkan belanja modal merupakan belanja aset atau aset lainnya yang mana mendatangkan manfaat lebih dari satu periode dan menambah kekayaan daerah dan aset tersebut yang dimanfaatkan untuk operasional sehari-hari bukan untuk kepentingan publik.

### **2. Jenis-jenis Belanja Modal**

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 /Tahun 2005, belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

#### **a) Belanja Modal Tanah**

Pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan yang mana di peroleh dari pembelian/pengadaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, dan

pengeluaran lainnya terkait pemerolehan hak atas tanah mengunkan belanja modal tanah.

**b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya yang di maanfaatkan untuk pembelian atau upaya perolehan guna peningkatan kualitas produksi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan wajib memiliki masaa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

**c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal bangunan dan gedung merupakan anggaran yang di alokasikan untuk pengadaan atau pembenahan fasilitas gedung dan bangunan daerah. Anggaran ini dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan, evaluasi hingga sampai bangunan dapat digunakan.

**d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas jalan, irigasi dan dalam kondisi siap digunakan.

**e) Belanja Modal Fisik Lainnya**

Maanfaatkan dari belanja modal fisik lainnya adalah untuk penggantian, pengadaan, peningkatan pembangunan, penambahan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak bisa dikelompokan dalam beberapa kriteria yaitu belanja modal tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan irigasi dan jaringan, belanja kontrak sewa

beli, hewan ternak dan tanaman, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal**

faktor-faktor dan pendapat para penelitian tentang yang mempengaruhi belanja modal. (Yustikasari, 2007) menjelaskan faktor-faktor dasar yang memberi efek terhadap belanja modal adalah PAD, DAU dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB). Sedangkan menurut (IRSYADI, 2014) dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah PAD, DAU, DAK, dan SILPA. Hasil penelitian (Eka Sintala Dewi Ajani, 2015) menjelaskan faktor yang menjadi penentu belanja modal pada Pemerintah Daerah di NTB adalah PAD, DAU, dan SILPA.

## **C. Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pertumbuhan**

Pertumbuhan Ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumberdaya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut Boediono (1985) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sejalan dengan Boediono (1985) Sadono Sukirno (1991) menyebutkan Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu

indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Menurut Sukimo (2015: 423) dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian. Namun dengan demikian Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

## **D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menjadi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ( Annisa Wahyu Hikmah, 2019).

### **2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, membagi beberapa sumber dari PAD yaitu:

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-sebesarannya bagi kemakmuran rakyat.

#### **2. Retribusi daerah**

Retribusi Daerah merupakan pungutan dari daerah dimana sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah berupa pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 angka 3 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil dari penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

### **E. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari

pendapatan APBN, dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan daripada Dana Alokasi Umum yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah berdasarkan penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pasal 37 tentang dana perimbangan, ada beberapa ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum yaitu:

1. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
2. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26%(dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
3. Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10%(sepuluh persen) dan 90%(sembilan puluh persen).
5. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APBN.

#### **F. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SILPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran atau terjadi efisiensi anggaran, maka akan dimungkinkan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh kecil. Bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah maka akan menyebabkan defisit fiskal, dan tidak ada SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi sisa kurang pembiayaan anggaran (SiKPA).

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa SILPA merupakan salah satu sumber pembiayaan defisit selain dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah apabila APBD diperkirakan defisit.

## **G. Luas Wilayah**

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Luas wilayah menurut Nora (2015:50) adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Rochmatullah dkk (2016:156) menyatakan bahwa kawasan dengan wilayah yang relatif luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan pelayanan publik yang tepat. Daerah dengan daerah pedesaan yang luas perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk mengembangkan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum. Dalam penelitian Putra (2017:17) memberikan kesimpulan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas, belanja modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga belanja modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas Universitas Sumatera Utara 21 penyediaan sarana dan prasarana. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan

## H. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Erdi Adyatma (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi	X1 : PAD X2 : DAU Z : Pertumbuhan Ekonomi	H1: tidak berpengaruh H2: sangat berpengaruh H3: sangat berpengaruh H4: berpengaruh
2	RITA DEVI SETIYANI (2015)	PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL	X1 : DANA ALOKASI UMUM (DAU) X2 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) X3 : SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) X4 : LUAS WILAYAH	H1 : berpengaruh positif H2 : berpengaruh negatif H3: berpengaruh positif H4: berpengaruh negatif
3	Miardi Nurzen (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	X1: Pertumbuhan Ekonomi X2: Pendapatan Asli Daerah X3: Dana Alokasi Umum	H1: tidak berpengaruh H2: berpengaruh positif H3: berpengaruh positif
3	Robin Keswando (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : Luas Wilayah	H1 : Berpengaruh positif signifikan H2 : Berpengaruh positif tidak signifikan H3 : Berpengaruh positif tidak signifikan H4 : Berpengaruh positif signifikan H5 : Berpengaruh positif signifikan

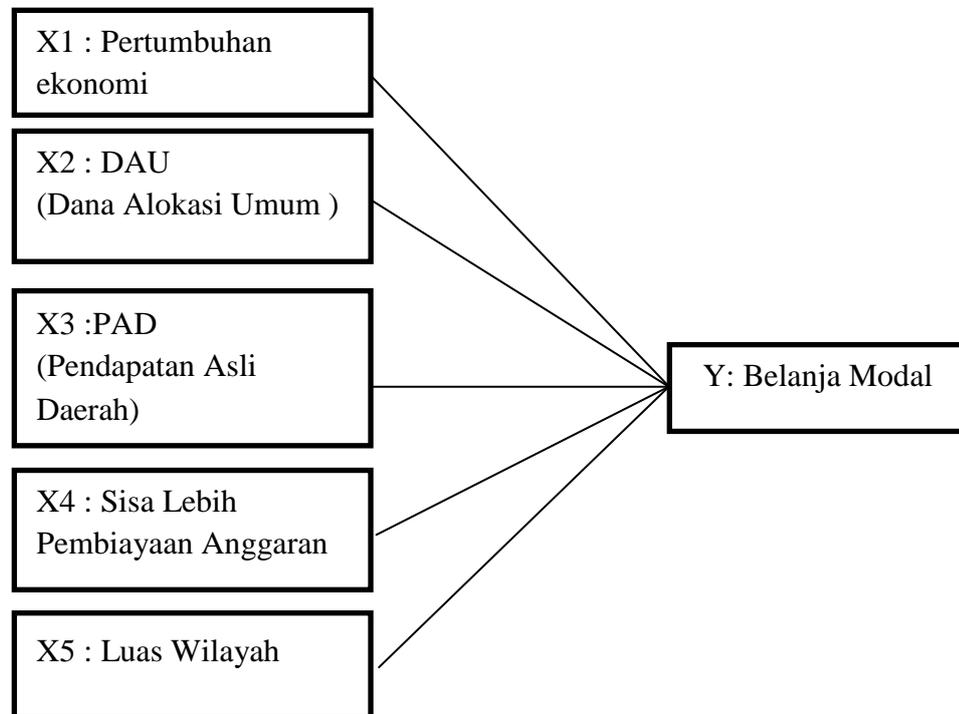
4	Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016)	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, SILPA DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL	X1 : PERTUMBUHAN EKONOMI X2 : PAD X3 : DAU X4 :SILPA X5 : LUAS WILAYAH	H1 : tidak berpengaruh positif H2 : berpengaruh positif H3 : tidak berpengaruh positif H4 : berpengaruh positif H5 : berpengaruh positif
5	Desak Gede Yudi Atika Sari, Put Kepramareni, Ni Luh Gde Novitasari ( 2017 )	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota se-bali	X1: Pertumbuhan ekonomi X2 : pendapatan asli daerah X3 : dana perimbangan X4 : sisa lebih pembiayaan anggaran	H1: Berpengaruh Negatif H2: Berpengaruh Positif H3: Berpengaruh Negatif H4: Berpengaruh Negatif
6	Wimpi Priambudi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013	X1 : PAD X2 : DAU	H1 : Berpengaruh Positif H2 : Berpengaruh Positif H3 : Berpengaruh Positif
7	Nanda Yoga Aditiya (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : SILPA	H1 : Berpengaruh positif signifikan H2 : Tidak Berpengaruh positif signifikan H3 : Berpengaruh positif signifikan H4 : Tidak Berpengaruh positif signifikan

		Tahun 2013-2015		
8	Rendy Armando Kakasih (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016	X1 : PAD X2 : DAU	H1 : Tidak Berpengaruh Signifikan H2 : Berpengaruh Signifikan H3 : Berpengaruh Signifikan
9	Sandra Okynawa (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur (APBD Tahun Anggaran 2016)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : SILPA	H1 : Berpengaruh H2 : Berpengaruh H3 : Berpengaruh H4 : Berpengaruh
10	M. SYARIF HAFIZH SIMATUPANG (2018 )	PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, LUAS WILAYAH , DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH	X1 : PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) X2 : TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH X3 : UAS WILAYAH X4 : KEPADATAN PENDUDUK	H1 : berpengaruh H2 : berpengaruh H3 : berpengaruh H4 : berpengaruh
11	ANNISA WAHYU HIKMAH (2019)	PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI	X1 : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) X2 : DANA ALOKASI UMUM (DAU)	H1 : berpengaruh H2 : tidak berpengaruh H3 : tidak berpengaruh H4 : ) tidak

		DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), LUAS WILAYAH DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP BELANJA MODAL	X3 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) X4 : SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) X5 : KINERJA KEUANGAN	berpengaruh H5 : tidak berpengaruh H6 : tidak berpengaruh
12	Nurur Rohmah dan Ikhsan Budi Riharjo (2019)	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL	X1 : PENDAPATAN ASLI DAERAH X2 : DANA PERIMBANGAN X3 : LUAS WILAYAH	H1 : berpengaruh positif H2 : berpengaruh positif H3 : berpengaruh positif H4 : berpengaruh positif
13	Bintang Marseno dan Erly Mulyani (2020 )	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah	X1 : Pertumbuhan Ekonomi X2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) X3 : Jumlah Penduduk X4 : Luas Wilayah	H1 : tidak berpengaruh H2 : berpengaruh H3 : tidak berpengaruh H4 : berpengaruh

## I. KerangkaKonseptual

Hubungan antara variabel dependen dan independen dapat digambarkan melalui kerangka konseptualnya sebagai berikut :



## J. Hubungan Antar Variabel

### 1. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal

Untuk menghadapi era globalisasi ekonomi, indonesia telah melakukan langkah yang tepat dengan memberikan kebijakan ekonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah yang mana hal ini akan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi akan bisa dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat dan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya hal ini akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat (Suratno, 2010). Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda - beda yang menyebabkan pertumbuhannya pun berbeda yang mana daerah yang memiliki potensi yang bagus makan investasi modal swasta maupun pemerintah akan berbeda dengan daerah yang lain.

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi yang mana hal ini bisa di lihat dari PDRRB ( produk Domestik Regional Bruto) atau pendapatan akhir pasar dari barang dan jasa yang di hasilkan dari suatu perekonomian (Putro, 2010). Menurut Darwanto (2007) faktor yang bisa mempengaruhi pembangunan suatu daerah adalah sumber daya alam, teknologi, investasi, industri, kewirausahaan dan dukungan pemerintah. Egi Nofrizal (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap besarnya belanja modal suatu daerah.

Dari penelitian dan pendapat yang di dipaparkan maka kebijakan ekonomi daerah akan mempengaruhi terbentuknya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dengan potensi yang berbeda – beda maka tingkat pertumbuhan ekonominya sejalan dengan potensi daerah tersebut. maka Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal

### **H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal**

#### **2. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN, dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal yang berguna dalam pengadaan sarana prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Dana Alokasi Umum berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan maksud pemerataan keuangan antar

daerah dan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Farah (2011) dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, DAU merupakan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan hal itu, akan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat secara leluasa menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Farah (2011) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, yang artinya semakin besar dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintahan pusat kepada daerah maka semakin tinggi anggaran belanja modal yang dapat digunakan oleh pemerintahan daerah. Sejalan dengan penelitian Wandira (2013) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Fiona (2013) mengemukakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang disebabkan oleh dengan adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintahan pusat maka pemerintahan daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Wimpi (2017) juga mengemukakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rudi (2017) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Made (2018) juga menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Widya (2018) mengungkapkan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Rendy (2018) juga menyatakan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

**H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal**

### **3. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi anggaran belanja modal. Farah (2011) Pemerintah daerah (agent) bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) karena masyarakat telah melaksanakan kewajibannya melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah memiliki hubungan dengan pengalokasian belanja modal, akan tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Tingginya tingkat produktivitas suatu masyarakat yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang memadai, ini akan berdampak pada menariknya minat investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Made (2018) menyatakan pendapatan asli daerah merupakan faktor penentu dalam menentukan anggaran belanja modal dimana alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan PAD yang diterima.

Wandira (2013) juga menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Fiona (2013) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Wimpi (2017) juga mengemukakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Rudi (2017) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Made (2018)

mengemukakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Widya (2018) serta menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal**

#### **4. Hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan Belanja modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu (1) periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir periode pelaporan akan di pindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SILPA menjadi indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Jumlah SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Rudi, 2017).

Menurut Engkos Kosim (2017) dan Sandra Okynawa (2018) menyatakan bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, SILPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir

tahun anggaran belum diselesaikan. Sejalan juga dengan Muhammad Abduh (2020) yang menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **H4: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal**

### **5. Hubungan antara Luas Wilayah dengan Belanja Modal**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Karena itu semakin luas suatu wilayah maka akan semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk belanja modal.

Luas wilayah suatu daerah akan dapat dijadikan ukuran oleh suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya dengan tujuan untuk pembangunan, yang terutama pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah dalam pembangunan jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur yang berupa jalan tersebut akan dapat mempermudah akses ke suatu daerah dan juga dapat memperlancar transportasi, yang akan dapat memperlancar pengiriman barang dari daerah ke daerah. Dengan lancar arus barang tersebut maka akan memperlancar investor untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat meningkatkan belanja modal terhadap daerah tersebut. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian dari daerah itu sendiri.

Sejalan dengan hasil penelitian Rita Devi Setiyani (2015), Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati (2016), Era Miluawati Utami (2019), Annisa Wahyu

Hikmah (2019), Nurur Rohmah (2019), Bintang Marseno (2020), bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Memiliki infrastruktur yang baik merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, dengan infrastruktur yang maksimal pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar.

**H5: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5. Luas wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **B. KETERBATASAN**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas wilayah sebagai variabel independen sehingga memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain.
2. Dikarenakan data yang digunakan data sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) sehingga belum dapat menggambarkan secara detail tentang ketergantungan masing-masing Pemerintah daerah akan PADdaerahnya.
3. Data penelitian yang digunakan hanya 5 tahun yaitu tahun 2015 -2019.

4. Dalam penelitian ini hanya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan hal apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal.
5. Dalam penelitian ini masih belum jelasnya mengenai data belanja modal, yang masih belum penulis temukan untuk mendukung opini dari pemahaman selama melakukan penelitian.

### **C. SARAN**

1. Bagi seluruh kabupten di Provinsi Bengkulu agar lebih mengoptimalkan penggunaan Belanja Modal yang mana bertujuan untuk mensejahteraan seluruh rakyat.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bengkulu diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat Otonomi Daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu harus mampu menggali sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pemerintah daerah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan mengelola sumber daya alam termasuk sumber daya laut.
5. Bagi pemerintahan daerah lebih memperhatikan SDM dan perencanaan dalam anggaran belanja modal
6. Menambahkan data yang mendukung variabel independen dan dependen
7. Penelitian selanjutnya dimasa mendatang agar dapat memperluas atau menambah periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nanda Yoga dan Novi Dirgantari. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1, Maret 2017.
- Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Rahmawati Meita. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". ISSN 1979-4878, Volume 4 Nomor 2 Nopember 201
- Anjani, Eka Sintala Dewi & Akram. 2015. Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat. Vol 11, No. 1 Hal 1-21.
- Annisa, Wahyu Hikmah. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Diss. Universitas Widya Dharma, 2019.
- Ceunfin, S., D. Prajitno., P. Suryanto., dan E. T. S. Putra. 2017. Penilaian Kompetisi dan Keuntungan Hasil Tumpangsari Jagung Kedelai di Bawah Tegakan Kayu Putih. *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*.
- Darwanto dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 juli 2007.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Irsyadi. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Kakasih, Rendy Armando dan George M.V. Kawung, Steeva Y.L Tumangkeng.(2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.18 No. 02.
- Keswando, Robin, Suharno, Djoko Keistiano 2016. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dal luas wilayah terhadap alokasi belanja modal studi empiris di provinsi jawa timur.

Program studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Slamet Riyadi  
Surakarta

- Kosim, Engkos. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar. *Journal of Management Review* ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E 2579-812X.
- Mardiasmo.(2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marseno, Bintang, and Erly Mulyani. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 2.4 (2020): 3452-3467.
- MUCHSON, Mohammad, and M. Ec Boediono. Faktor-faktor penyebab kemiskinan di pedesaan:: Kasus desa Salamrejo Kabupaten Kulon Progo. Diss. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada, 1985.
- Muflikhah, Muflikhah, Bambang Rusdiarso, Edy Giri Rachman Putra, and Nuryono Nuryono. "Modification of silica coated on iron sand magnetic material with chitosan for adsorption of Au (III)." *Indonesian Journal of Chemistry* 17, no. 2 (2017): 264-273.
- Nainggolan, Benny Rojeston Marnaek. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKRAB JUARA Yayasan Akrab Pekanbaru*.
- Nofrizal, Egi, Akhsanul Haq, and Sigit Edi Surono. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi* 2.2 (2017).
- Nora, Rizky. Prita S.D.S. dan Indriyani, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*.
- Nurharibnu Wibisono & Arini Wildaniati. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, SILPA Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Universitas Merdeka Madiun*
- Nurzen, Miardi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Vol 5 ISSN 2460-0585.
- Nurzen, Miardi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Vol 5 ISSN 2460-0585.

- Priambudi, Wimpi. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. Vol.06. No 01.
- Priambudi, Wimpi. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013, Jurnal Nominal", Vol. 4 No. 1, dalam [http://eprints.uny.ac.id/38918/1/skripsi\\_wimpi%20priambudi\\_12812141018.pdf](http://eprints.uny.ac.id/38918/1/skripsi_wimpi%20priambudi_12812141018.pdf), diakses 30 Agustus 2018.
- Purwanto, Fiona Puspita Devi. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, Ferdian. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *ejournal unp*. Vol 5. No 1 : Seri C
- Rochmatullah, Mahameru Rosy, Rudy Hartanto, dan Atwal Arifin, 2016. "Determinating The Value of Capital Expenditure Allocation in Indonesia Local Government", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 2 hal 152-166
- Rohmah, Nurur, and Ikhsan Budi Riharjo. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013–2017)." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.6 (2019).
- Sandra Okynawa . 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur (Apbd Tahun Anggaran 2016). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang.
- Sari, Desak Gede Yudi Atika. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota Se-Bali. *Kumpulan Riset Akuntansi Universitas Mahasaraswati*. Vol. 9. No. 1
- Sari, Desak Made Mya Yudia dan Dewa Gede Wirama. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22. No.3.
- Setiyani, Rita Devi. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009-2013. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Simatupang, M. "Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Luas Wilayah, dan Kepadatan

- Penduduk Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)." (2018).
- Sukimo, Sadono. (2015). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi 1. Cetakan 21. Jakarta: Rajawali Pcrs
- Sukirno, Sadono. "Makroekonomi: Teori Pengantar (edisi pertama)." Jakarta: Raja Grafindo (1991).
- uratno, Putro. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (study kasus kab/kota di provinsi Jawa tengah). Sustainable Development. Vol. 4 No. 3. Juni 2013.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Yana, Widya. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DOK Terhadap Belanja Modal Dengan SILPA sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Repositori Institusi USU.
- Yovita, Farah Marta dan Dwi Cahyo Utomo. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Yovita, Farah Marta dan Dwi Cahyo Utomo. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.